

DAFTAR REFERENSI

- Ammalik, Danu. 2014. *Analisis Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap PAD Kota Padang Tahun 2008 – 2012*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2009. *Pelengkap Buku Pegangan 2009 Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. 2011. *Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. Dipenda. Kota Padang.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. 2012. *Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. Dipenda. Kota Padang.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. 2013. *Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. Dipenda. Kota Padang.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. 2014. *Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. Dipenda. Kota Padang.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. 2015. *Pendapatan Asli Daerah Kota Padang*. Dipenda. Kota Padang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi.
- Nugroho A, Wisnu. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kota Bandung*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan P, Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo.

Sudrajat R, Andi. 2016. *Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan untuk Meningkatkan PAD Kota Bandung*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: PT Indeks

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo

Yudishtira, Bintoro. 2013. *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap PAD Kota Bandung 2001 – 2010*. Skripsi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.